

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Jika pertumbuhan UMKM terus menerus meningkat maka memiliki kontribusi terhadap sektor ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018

Tahun	UMKM (Unit)	Perkembangan (Persen)
2003	58.560	-
2004	59.823	2.16
2005	61.458	2.73
2006	62.854	2.27
2007	62.742	-0.18
2008	63.671	1.48
2009	68.560	7.68
2010	74.529	8.71
2011	78.459	5.27
2012	79.119	0.84
2013	81.552	3.08
2014	81.959	0.50

2015	81.979	0.02
2016	82.479	0.61
2017	82.700	0.27
2018	83.150	0.54
Rata – Rata		2.40

Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan table 5.1 data dari badan pusat statistic perkembangan rata – rata UMKM tahun 2003 – 2018 adalah sebesar 2.40 persen pertahun, semakin meningkatnya pertumbuhan UMKM selama 15 tahun tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan pada kabupaten – kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi.

Meningkatnya pembangunan dari sektor industry UMKM dalam meningkatkan unit usaha di Provinsi Jambi ini disebabkan karena besarnya peranan pemerintah dalam meningkatkan usaha – usaha dengan memberikan perizinan yang mudah dalam membuat usaha baru. Tingginya pertumbuhan unit usaha pada tahun 2010 yaitu mencapai 8.71 persen hal ini didukung dengan pemodalannya yang cukup tinggi dan akan berdampak langsung dengan pertumbuhan usaha-usaha baru, dalam meningkatkan unit usaha baru para wirausaha perlu peranan pemerintah hal tersebut bertujuan untuk melindungi harga – harga pasar yang akan di jual atau distribusikan oleh produsen ke pasar dengan harga seimbang sehingga tidak ada ketimpangan antara produsen dengan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan pertumbuhan pada tahun 2007 menurun mencapai 0.18 persen, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut sektor industry UMKM di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang disebabkan karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam melakukan kegiatannya yaitu lebih besar di biaya modal daripada pendapatan yang di terima oleh industry

kecil. Sehingga pertumbuhan pada tahun tersebut masih sangat rendah yang disebabkan kurangnya modal dan masih sulitnya untuk mendirikan usaha – usaha baru. Dalam memprioritaskan industry kecil dibanding industry besar.

5.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi 2003 – 2018

Pertumbuhan ekonomi merupakan factor utama dalam meningkatkan pembangunan daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan untuk pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang, pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Periode 2003-2018

Tahun	PDRB Harga Konstan (Miliar)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2003	11.343.279.99	-
2004	11.953.885.47	5.38
2005	12.619.972.18	5.57
2006	13.363.620.73	5.89
2007	14.275.161.35	6.82
2008	15.297.770.56	7.16
2009	16.274.907.72	6.39
2010	17.471.685.88	7.35
2011	18.963.517.50	8.54
2012	20.373.532.62	7.44
2013	21.979.350.29	7.88
2014	23.559.641.99	7.19
2015	24.538.700.00	4.16
2016	25.980.014.05	5.87
2017	26.649.455,35	2.58
2018	27.905.389,06	4.71
Rata – Rata		6.20

Sumber: Badan pusat statistik (2019)

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi berfluktuatif. Dengan rata-rata Pertumbuhan ekonomi 6.20 persen, perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 8,54%, sedangkan Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.16%. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dapat di mungkinkan oleh ketersediaan modal yang lebih besar, seringkali di picu oleh menarik investasi

asing langsung. Perbaikan dalam kesehatan dan pendidikan penduduk suatu Provinsi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikasi bahwa adanya peranan sektor ekonomi yang tinggi terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Jambi terutama sektor pertanian.

5.3 Perkembangan Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018

Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Inflasi yang terus berlanjut apalagi sampai melampaui angka dua digit dapat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi nasional. Adapun inflasi Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2018

Tahun	Inflasi (Persen)
2003	3.79
2004	7.25
2005	16.50
2006	10.66
2007	6.13
2008	8.66
2009	5.70
2010	8.00
2011	9.00
2012	9.09
2013	7.59
2014	6.63

2015	5.29
2016	3.57
2017	4.24
2018	3.02
Rata – Rata	7.67

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan inflasi Provinsi Jambi periode 2003-2018 rata-rata adalah 7.67 persen/tahun tingkat inflasi setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi terus fluktuatif dalam kurun waktu 15 tahun tersebut, hal ini dikarenakan adanya perubahan dari perubahan harga-harga komoditi maka permintaan masyarakat meningkat secara agregat. Peningkatan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan dari permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap.

Pada tahun 2003 yaitu sebesar 3.79 persen terjadinya penurunan yang cukup tinggi hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4.99 persen maka adanya dampak dari perekonomian Provinsi Jambi mampu menekan angka inflasi, akan tetapi pada tahun 2004 inflasi Provinsi Jambi meningkat kembali sebesar 7.25 persen, dan pada tahun 2005 inflasi meningkat kembali menjadi 16.50 persen, hal ini menandakan adanya penurunan dari aspek perekonomian, maka pola konsumsi masyarakat yang menurun pada saat itu, pada tahun 2006 inflasi kembali menurun menjadi 10.66 persen. Di tahun 2009 inflasi merangkak turun kembali menjadi 5.70 persen pada tahun 2010 kembali menguat menjadi 8.00 persen. Pada tahun 2015 inflasi kembali menurun menjadi 5.29 persen, pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 3.57 persen pada tahun 2017 inflasi kembali meningkat menjadi 4.24 persen, dan pada tahun 2018

kembali menurun menjadi 3.02 persen, hal ini karena hal ini karena mulai pulihnya perekonomian Negara Indonesia dan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya di Provinsi Jambi kena dampak dari krisis finansial tersebut, seiring penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keuangan global pada tahun ini merupakan tingkat inflasi terendah Indonesia selama periode 2003-2018.

Namun pada tahun 2005 inflasi berada pada angka 16.50 persen, pada tahun ini merupakan perkembangan inflasi tertinggi, karena terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pertengahan tahun 2004 dan suku bunga Indonesia yang cukup tinggi yaitu sebesar 2.29 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bensin yang mengalami kenaikan harga pada pertengahan tahun, menjadi salah satu komoditas penyumbang terbesar laju inflasi. Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama 2005. Terlihat kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun berpengaruh pada keseluruhan inflasi secara nasional, dan hal tersebut berdampak juga pada kenaikan harga komoditas dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi Provinsi Jambi terendah pada tahun 2018 sebesar 3.02 persen, rendahnya inflasi pada tahun tersebut dikarekan Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 4.71 persen, dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat menjadi 988.95 rupiah berdasarkan data dari badan pusat statistik Provinsi Jambi sehingga mampu menekan inflasi yang terjadi pada tahun tersebut.

5.4 Perkembangan Suku Bunga Indonesia Tahun 2003 – 2018

Suku Bunga Indonesia merupakan suku bunga yang mencerminkan sikap dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Dampaknya dimana saat suku bunga Indonesia naik

maka perusahaan pembiayaan mendapatkan pinjaman dari bank dengan suku bunga yang baru.

Berikut perkembangan suku bunga Indonesia:

Tabel 5.4 Suku Bunga Indonesia Periode 2003-2018 (Persen)

Tahun	Suku Bunga Indonesia (Persen)	Perkembangan (Persen)
2003	6.61	-
2004	6.17	-6.66
2005	12.75	106.65
2006	9.75	-23.53
2007	8.00	-17.95
2008	9.25	15.63
2009	6.50	-29.73
2010	6.50	0.00
2011	6.00	-7.69
2012	5.75	-4.17
2013	6.48	12.70
2014	7.54	16.36
2015	7.52	-0.27
2016	5.50	-26.86
2017	4.75	-13.64
2018	5.75	21.05
Rata – Rata		2.79

Sumber: Badan pusat statistik (2019)

Berdasarkan tabel 5.4 suku bunga Indonesia pada tahun 2003 – 2018 meningkat rata-rata sebesar 2.79 persen, pada tahun 2003 dikisaran 6.61 persen, pada tahun 2007 meningkat menjadi 8.00 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 17.95 persen, pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 6.00 persen atau menurun sebesar 7.69 persen, pada tahun 2015 menurun kembali menjadi 7.52 persen atau menurun sebesar 0.27 persen, dan pada tahun 2018 suku bunga Indonesia kembali menguat menjadi 5.75 persen atau meningkat 21.05 persen.

Suku bunga Indonesia yang pertumbuhannya berfluktuatif ini akibat dari tingkat inflasi Indonesia, semakin tinggi inflasi yang di hasilkan maka akan berdampak terhadap suku bunga Indonesia tersebut. Pertumbuhan suku bunga Indonesia tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 12.75 persen atau meningkat 106.65 persen, hal ini karena Indonesia yang cukup tinggi yaitu 6.45 persen atau inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 16.50 persen. Sedangkan suku bunga yang

menurun tertinggi yaitu pada tahun 2009 dengan suku bunga Indonesia sebesar 6.50 persen, atau menurun menjadi 29.73 persen karena akibat dampak inflasi Indonesia yang cukup rendah sebesar 2.78 atau inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 5.70 persen, maka inflasi merupakan salah satu tolak ukur dalam terjadinya perubahan suku bunga Indonesia.

5.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Suku Bunga Indonesia Terhadap Jumlah Unit Usaha UMKM di Provinsi Jambi

Analisis ini menggunakan metode regresi linier berganda, data yang digunakan secara *time series* yaitu dalam kurun waktu 2003 – 2018 dengan jumlah distribusi frekuensi sebanyak 16 tahun maka di peroleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.5 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.46848	0.237236	48.34205	0.0000
PE	0.000736	0.029368	0.025068	0.0094
INF	0.005692	0.019399	0.293433	0.0342
SBI	-0.045735	0.029932	-1.527996	0.0424
R-squared	0.618251	Mean dependent var		11.18576
Adjusted R-squared	0.147813	S.D. dependent var		0.137104
S.E. of regression	0.126566	Akaike info criterion		-1.083787
Sum squared resid	0.192228	Schwarz criterion		-0.890639
Log likelihood	12.67029	Hannan-Quinn criter.		-1.073896
F-statistic	3.867258	Durbin-Watson stat		0.598502
Prob(F-statistic)	0.007438			

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5.5 Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log(UMKM)} = 11.46848 + 0.000736 \text{ PE} + 0.005692 \text{ INF} - 0.045735 \text{ SBI}$$

Dari hasil tersebut kemudian dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik.

5.5.1 Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinieritas

Multikolinearitas muncul ketika terjadi hubungan linier antara variabel independent baik dalam bentuk linier yang sempurna maupun hubungan linier yang kurang sempurna. Ketika terjadi hubungan antara variabel independent dalam suatu model regresi, masalah multikolinearitas akan tetapi akan hubungan dengan asumsi variabel gangguan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model persamaan pada penelitian ini digunakan korelasi antara variabel independent. Nilai VIF antar variabel dilihat melalui Tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.056281	56.21430	NA
PE	0.000862	34.21469	1.000000
INF	0.000376	23.37260	1.000000
SBI	0.000896	49.42723	1.000000

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5.6 nilai Centered VIF setiap variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga Indonesia bahwa nilai korelasi yang tidak melebihi 1.00000 mengidentifikasi bahwa tidak terjadi nya multikolinearitas yang serius.

2. Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi gejala heteroskedaksitas dalam model ini digunakan uji heteroskedasitas dengan metode White tanpa Cross Terms dan Metode White dengan Cros Terms. Hasil uji heteroskedasitas dengan metode White tanpa Cross Terms dapat dilihat melalui Tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7 Uji Heteroskedasitas

F-statistic	1.663082	Prob. F(9,6)	0.2758
Obs*R-squared	11.42154	Prob. Chi-Square(9)	0.2479
Scaled explained SS	5.692381	Prob. Chi-Square(9)	0.7703

Sumber : Data diolah (2021)

Dari hasil test pada table 5.7 Nilai Chi Square hitung 11.42154 diperoleh dari informasi Obs*R-Square. Sementara nilai kritis Chi Square tabel pada $\alpha = 0,05$ persen dengan distribusi frekuensi 4 adalah sebesar 22.36203 hal ini menunjukkan bahwa Chi-Square hitung < Chi-Square Tabel atau $11.42154 < 22.36203$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedasitas. Dan dapat dilihat juga dari nilai Probabilitasnya Chi-Square sebesar $0,2479 > 0,05$ persen yang berarti tidak signifikan maka tidak terdapat heterokedasitas.

3. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya hubungan antar gangguan. Metode yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah *Metode Bruesch-Godfrey* yang lebih dikenal dengan *LM-Test*. Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*. Dimana jika nilai probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan maka H_0 diterima, berarti tidak ada masalah autokorelasi. Dapat dilihat dari hasil estimasi sepertinya tidak terjadi permasalahan yang melanggar asumsi klasik. Dimana terlihat bahwa nilai t-statistik signifikan., R^2 bagus, dan Uji F juga signifikan. Namun dalam hasil tersebut terdapat DW stat yang relatif kecil. Nilai DW yang kecil tersebut merupakan salah satu indikator adanya masalah autokorelasi. Untuk membuktikan adanya masalah autokorelasi dalam model dapat kita lakukan dengan melakukan uji LM. Sebagai berikut:

Tabel 5.8 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	9.892278	Prob. F(2,10)	0.0043
Obs*R-squared	10.62809	Prob. Chi-Square(2)	0.0049

Sumber: Data diolah (2021)

Dari hasil test Table 5.8 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hasil estimasi tersebut tidak terjadi masalah autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih dari tingkat

keyakinan ($\alpha = 0,05$ persen) atau nilai chi-square $0,0049 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti dalam model tidak terdapat autokorelasi.

5.5.2 Uji Hipotesis

1. Uji F Statistik (Secara Bersama-Sama)

Demikian uji f statistik dengan jumlah distribusi frekuensi sebanyak 16 tahun dengan tingkat signifikansi sebesar 95 persen maka diketahui nilai probabilitas f statistik sebesar $0,007438 < 0,05$ persen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa semua koefisien regresi atau semua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia secara bersama – sama berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi.

2. Uji t Statistik (Secara Individual)

Berdasarkan hasil persamaan regresi di dapat hasil uji t statistik, yaitu untuk melihat pengaruh secara individual pada setiap variabel sebagai berikut:

1. Tingkat signifikansi sebesar 95 persen maka diketahui nilai probabilitas t statistik sebesar $0,094 < 0,05$ persen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi.
2. Tingkat signifikansi sebesar 95 persen maka diketahui nilai probabilitas t statistik sebesar $0,0342 < 0,05$ persen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi.
3. Tingkat signifikansi sebesar 95 persen maka diketahui nilai probabilitas t statistik sebesar $0,0424 < 0,05$ persen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel suku bunga Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi.

5.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen yang bisa dijelaskan variabel independen. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,618251 sehingga dapat dikatakan bahwa 61.82 persen pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia. Sedangkan sisanya 38.18 persen dijelaskan faktor lain diluar penelitian.

5.6 Analisis Ekonomi

5.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi

Dari hasil regresi diketahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.000736 artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0.000736 persen. Pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM dikarenakan hal tersebut berarti semakin besar pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi akan semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin kecil pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi akan semakin menurun.

UMKM adalah satu sektor perekonomian yang potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah kebawah, selain sektor perekonomian potensial UMKM juga mampu memberikan sumbangan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, dan juga mampu dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat

struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

5.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi

Dari hasil regresi di ketahui inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.005692 artinya jika variabel inflasi meningkat 1 persen maka pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0.005692 persen. Inflasi erat kaitannya dengan pertumbuhan UMKM karena inflasi sebagai penunjang dalam memilih meningkatkan modal atau lebih memilih menabung. Ketika terjadi kenaikan inflasi akan mempengaruhi dalam menyalurkan pembiayaannya untuk UMKM. Ketika inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan justru ikut mengalami peningkatan.

Secara teori hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi mempengaruhi para penabung. Bagi para penabung inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank (Huda et al, 2008).

5.6.3 Pengaruh Suku Bunga Indonesia Terhadap Pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi

Dari hasil regresi di ketahui suku bunga Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.045735 artinya

jika variabel suku bunga Indonesia meningkat 1 persen maka pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi menurun sebesar 0.045735 persen. Suku bunga Indonesia berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM karena

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan kredit. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi jumlah kredit secara langsung, karena suku bunga merupakan beban yang harus dibayar oleh debitur kepada pihak bank. Pada umumnya kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan turunnya permintaan kredit, begitu pula sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan kredit

Secara teori hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika suku bunga Indonesia mengalami penurunan akan menyebabkan penurunan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Dampak penurunan suku bunga pada kegiatan UMKM diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi UMKM. Sebaliknya ketika suku bunga naik maka akan menyebabkan pembiayaan UMKM turun.

5.7 Implikasi dan Kebijakan

Dalam analisis makro ekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003). Indikator perkembangan UMKM juga dilihat dari ekspor pada sektor UMKM, peluang untuk mengembangkan UMKM

yang akan memasuki pasar ekspor masih sangat memiliki prospek yang cukup baik dan memiliki potensi yang cukup besar dimasa mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan UMKM merupakan prakondisi untuk menciptakan situasi ideal sebagai prasyarat bagi pengembangan UMKM. Dalam kaitan itu diperlukan adanya kejelasan kemauan politik, adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang dinamika serta kebutuhan UMKM serta memadainya kapasitas administratif dan dukungan finansial. Peningkatan pemahaman para pembuat kebijakan tentang dinamika UMKM dan output kebijakan pengembangan UMKM harus berorientasi pada persoalan serta kebutuhan UMKM yang beragam.

Pengembangan UMKM tidak boleh melepaskan diri dari konteks lokal. Koordinasi menjadi penting pula antar institusi pendukung pengembangan UMKM agar gerakan pengembangan UMKM menjadi gerakan yang terintegratif dan menghindari terjadinya tumpang tindih berbagai kebijakan dan program. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 1996 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Pembinaan dan pengembangan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

Menurut Parson (2000) kebijakan merupakan pengaturan yang sifatnya berlaku umum. Kalau dikaitkan dengan pengertian "publik" hal itu akan mencakup upaya pengaturan bagi semua dimensi kegiatan manusia dalam suatu wilayah. Kebijakan dihasilkan karena ada hal-hal yang memerlukan pengaturan, yang dalam hal ini khususnya oleh pemerintah, sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerangka kebutuhan sosial kelompoknya. Pengaturan tersebut merupakan bentuk intervensi atau aplikasi tindakan umum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Eugene dan Morce (1965) dalam Tambunan (2001), terdapat 4 (empat) pilihan tipe kebijakan pemerintah sangat menentukan pertumbuhan UMKM :

1. Kebijakan do nothing policy: pemerintah apapun alasannya sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UMKM begitu saja.
2. Kebijakan memberi perlindungan (protection policy) terhadap UMKM: kebijakan ini bersifat melindungi UMKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi.
3. Kebijakan berdasarkan ideology pembangunan (developmentalist): kebijakan ini memilih industri yang potensial (picking the winner) namun tidak diberi subsidi.
4. Kebijakan yang semakin populer adalah apa yang disebut market friendly policy tanpa subsidi dan kompetisi.

UMKM perlu diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan. Atas pertimbangan tersebut pemerintah daerah Provinsi Jambi dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, dasar hukum atau peraturan daerah yang dapat memberikan peluang usaha UMKM agar maju dan berkembang. Pertama, dalam hal pengembangan pemasaran UMKM, Pemerintah Provinsi Jambi perlu juga memberikan dan merancang kebijakan yang sifatnya memberi perlindungan (protection policy) terhadap UMKM dalam bentuk peraturan daerah.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan dan kebijaksanaan meliputi aspek perlindungan. Penyatuan pasar domestik dengan internasional dewasa ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi UMKM lokal. Kecenderungan pasar global untuk memanfaatkan kelenturan UMKM penting diperhatikan oleh pemerintah. Kebijakan pengembangan pemasaran

diantaranya adalah:

1. Menciptakan pola hubungan produksi subkontrak atau promosi. Pola keterkaitan subkontrak lebih diprioritaskan bagi UMKM terhadap usaha besar. UMKM yang menjadi subkontraktor secara ekonomis diuntungkan karena adanya jaminan pasar dan kontinuitas produksi.
2. Penutupan sektor tertentu dari investasi seperti bidang pertanian atau agroindustri. Sektor ini diprioritaskan hanya bagi UMKM. Ini berarti peluang UMKM untuk berkembang menjadi terbuka.

Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengadopsi Keputusan Presiden (Kepres) nomor 127 tahun 2001 tentang Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan besar dengan syarat kemitraan. (Lampiran 1 Kepres nomor 127 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Perkembangan UMKM tahun 2003 – 2018 meningkat rata – rata sebesar 2.40 persen, peningkatan tertinggi pada tahun 2010 dan penurunan tertinggi pada tahun 2007. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2003 – 2018 meningkat rata – rata sebesar 6.20 persen, peningkatan tertinggi pada tahun 2011 dan peningkatan terendah tahun 2015. Perkembangan inflasi tahun 2003 – 2018 rata – rata sebesar 7.67 persen tertinggi pada tahun 2005 dan terendah 2018. Perkembangan suku bunga Indonesia tahun 2003 – 2018 rata – rata sebesar 2.79 persen, peningkatan tertinggi pada tahun 2005 dan penurunan tertinggi tahun 2009.
2. Hasil estimasi menggunakan uji f statistik menunjukkan bahwa semua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga Indonesia secara bersama – sama berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi, dengan uji t statistik menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi, inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi dan suku bunga Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi.

6.2 Saran

1. Salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi yaitu pertumbuhan ekonomi semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan meningkatkan investasi pada sektor UMKM, sehingga perhatian pada UMKM dapat diberikan dengan meningkatkan investasi pada UMKM, menjaga kestabilan harga dan suku bunga, dengan langkah tersebut dapat berupa perbaikan iklim usaha dan kemudahan izin usaha dalam investasi.
2. Dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM maka pemerintah Provinsi Jambi atau pihak Bank atau lembaga non keuangan seharusnya lebih memprioritaskan untuk meminjamkan modal kepada para pengusaha mikro sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan mudah yang sumber modalnya selain bersumber pada modal sendiri dan juga dapat bersumber dari luar seperti Bank Pemerintah yang membantu usaha tersebut dalam memperoleh pinjaman dengan syarat yang tertentu tetapi harus terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang pembukuan sederhana sehingga modal yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha.